



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PELAKSANAAN OPEN
GOVERNMENT INDONESIA /
OPEN GOVERNMENT INDONESIA
SELF-ASSESSMENT REPORT
TAHUN 2014**



Jakarta, 30 April 2015

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan: Dinamika OGI 2014 & Peran Indonesia sebagai Ketua OGP (2013/2014)
3. Rencana Aksi Open Government Indonesia 2014-2015
4. Proses Penyusunan Rencana Aksi: Lebih Transparan dan Lebih Partisipatif
5. Struktur Rencana Aksi
6. Pencapaian Rencana Aksi
7. Komitmen Unggulan OGI 2014
8. Penutup

1. Ringkasan Eksekutif

Tahun 2014 adalah tahun bersejarah dalam partisipasi Indonesia di dalam Open Government Partnership (OGP). Indonesia mendapat kehormatan untuk menjalankan peran sebagai Ketua Pemerintah OGP. Sebagai Ketua, Indonesia mengemban tugas penting di dalam menentukan prioritas selama satu tahun dan memantapkan pelaksanaan visi misi OGP sebagai sebuah organisasi multilateral global.

Dalam konteks dalam negeri, selama tahun 2014, kegiatan kunci pemerintah Indonesia adalah perumusan Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia 2014-2015. Proses perumusan berlangsung sekitar 6 (enam) bulan dari Desember 2013-Mei 2014.

Renaksi OGI 2014-2015 menekankan pada proses pelibatan masyarakat yang lebih intensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai respon pemerintah terhadap salah satu kritik utama publik terhadap kinerja pemerintahan pada umumnya dan perumusan rencana aksi OGI tahun-tahun sebelumnya secara khusus.

Mitra Kementerian dan Lembaga (K/L) yang turut serta dilibatkan dalam perumusan Renaksi 2014-2015 juga berjumlah dua kali lipat lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan semangat dan praktek keterbukaan di lebih banyak instansi pemerintah.

Dari 64 komitmen yang tertuang di dalam Renaksi 2014, 35 (55%) komitmen berhasil mencapai target keberhasilan, 17 (26%) komitmen masih dalam proses penyelesaian, dan 12 (19%) komitmen tidak tercapai.

Dua komitmen unggulan yang menjadi terobosan dalam Renaksi 2014-2015 meliputi inisiatif Portal Open Data sebagai pengejawantahan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengembangan saluran aspirasi dan pengaduan publik nasional melalui LAPOR! sebagai pengejawantahan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Renaksi OGI sepanjang tahun 2014 membawa berbagai pembelajaran di tengah masa transisi politik yang diiringi dengan semakin kuatnya dorongan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik dan partisipatif. Salah satu pembelajaran penting adalah perlunya memastikan transparansi terlaksana di setiap tahapan. Pemerintah dan publik perlu terus mempererat hubungan kerja maupun komunikasi dua arah yang harmonis agar tujuan pelaksanaan keterbukaan dapat tercapai dan membawa dampak positif terhadap perbaikan pelayanan publik.

Proses perumusan laporan pelaksanaan OGI 2014 kiranya dapat menjadi masukan berguna bagi pencapaian OGI di 2015 maupun penyusunan Rencana Aksi 2016-2017 di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo

2. Pendahuluan: Dinamika Open Government Indonesia 2014 & Peran Indonesia sebagai Ketua OGP (2013/2014)

Perjalanan Indonesia dalam melaksanakan inisiatif Open Government Partnership (OGP) semakin mengakar dan menguat sejak OGP diresmikan di bulan September 2011. Keterbukaan Pemerintah tidak hanya merupakan katalisator utama untuk reformasi, namun juga bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia dan agenda reformasi. Banyak dari pilar-pilar OGP yang identik dengan tema utama reformasi birokrasi Indonesia, seperti pemerintahan yang bersih, akuntabel, dapat dipercaya, dan responsif.

Tiga Renaksi Open Government Indonesia (tahun 2012, 2013 dan 2014-2015) sudah digulirkan, dua Laporan Pelaksanaan OGI/ *Government Self-Assessment Reports* (GSAR)¹ telah terpublikasikan, dan dua *Independent Report Monitoring* (IRM)² telah dijadikan bahan refleksi bagi pemangku kepentingan OGP di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga semakin menguat terutama melalui kerja sama Tim Inti Open Government Indonesia (OGI). Hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah anggota Tim Inti OG, dari 5 (lima) Kementerian dan 4 (empat) CSO di tahun 2012 menjadi 7 (tujuh) Kementerian dan 7 (tujuh) CSO semenjak 2013³. Rapat Tim Inti untuk membahas capaian dan agenda kegiatan open government diadakan secara regular, minimal satu kali setiap triwulan. Selain Tim Inti OGI, pembahasan Renaksi juga melibatkan berbagai perwakilan dari akademisi, asosiasi pengusaha swasta Indonesia, lembaga donor, perwakilan generasi pemuda, dan berbagai pihak yang terkait.

Ketika membicarakan perkembangan gerakan open government di Indonesia, ada dua dimensi yang harus senantiasa kita kaji, yaitu pelaksanaan gerakan open government di dalam negeri, dan peran Indonesia di dalam perkembangan internasional Open Government Partnership (OGP). Laporan ini akan menitikberatkan capaian implementasi gerakan Open Government Indonesia selama tahun 2014, namun demikian paparan singkat atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat fondasi organisasi OGP dan memperluas jaringan OGP di kawasan Asia diikutsertakan dalam laporan ini untuk melengkapi spektrum pengetahuan masyarakat atas kiprah Indonesia di dalam mengembangkan gerakan open government.

¹ Laporan Pelaksanaan OGI adalah laporan tahunan atas capaian keberhasilan renaksi OGI yang dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam nomenklatur internasional atau dalam konteks sistem pelaporan OGP internasional, laporan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat penulisan GSAR ini, IRM Progress Report 2013 Indonesia sedang memasuki tahap "open for public comment" sampai dengan 2 April 2015.

³ Anggota Tim Inti OGI per September 2014 adalah (dari pemerintah) UKP4, Bappenas, KemPanRB, KemKominfo, Kemlu, Kemendagri, Komisi Informasi Pusat dan (dari CSO) Pattiro, Transparency International Indonesia, Seknas Fitra, ICEL, Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, JARI Indonesia, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar.

Keketuaan Indonesia di OGP: Perkuat Fondasi OGP dan Utamakan Prinsip Partisipasi Publik

Sebagai salah satu negara pendiri OGP, Indonesia memainkan peran yang begitu penting di tampuk kepemimpinan global OGP di sepanjang tahun 2014, yakni sebagai Ketua Pemerintah (*Lead Government Chair*), didampingi oleh Mexico sebagai Wakil Ketua Pemerintah (*Support Government Chair*), Rakesh Rajani dari Twaweza dan Suneeta Kaimal dari Natural Resources Governance Institute (NRGI) yang masing-masing berperan sebagai Ketua CSO (*Lead CSO Chair*) dan Wakil Ketua CSO (*Support CSO Chair*). Keketuaan Indonesia di OGP berlangsung dari Oktober 2013 sampai dengan September 2014.

Tiga visi misi Indonesia selama menjadi Ketua OGP adalah: 1) memperkuat fondasi OGP sebagai organisasi global; 2) memperluas *outreach* OGP di kawasan Asia Pasifik; 3) memperkuat implementasi komitmen OGP di Indonesia.

Untuk menjalankan visi misi di atas, Pemerintah Indonesia memfokuskan partisipasi publik sebagai sebuah langkah strategis dalam mendorong pemerintahan yang terbuka. Partisipasi publik dipilih sebagai “tema utama” dari Keketuaan karena di samping partisipasi publik adalah suatu prinsip dasar dan kunci keberhasilan dari suatu pemerintahan yang terbuka, namun di sisi lain, pelaksanaan dan pengejawantahan prinsip partisipasi publik tidak semudah yang dibayangkan dan diharapkan. Ada banyak kepentingan pribadi dan kelompok yang bertabrakan dan saling ingin didahulukan di atas kepentingan kesejahteraan publik. Atas dasar inilah, pemerintah Indonesia percaya bahwa yang dibutuhkan adalah komitmen dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawali proses pembelajaran dengan melaksanakan pelibatan publik di setiap proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya.

Di akhir keketuaan Indonesia, 4 (empat) capaian utama yang dapat dilaporkan ke publik yaitu:

1. Diluncurkannya OGP Strategi 2015-2018 sebagai panduan utama negara anggota dan seluruh pemangku kepentingan OGP di dalam mengembangkan OGP sebagai organisasi berskala global yang bisa membawa dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat global (<http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/4Year-AP-Online.pdf>).
2. Indonesia mengadakan 3 (tiga) kegiatan berskala regional dan internasional untuk memperluas jangkauan dan pengenalan publik internasional terhadap OGP:
 - a. Konferensi Regional Asia Pacific OGP (OGP Asia Pacific Regional Conference), 6-7 Mei 2014, Bali⁴

⁴ Tautan informasi lengkap tentang kegiatan ini bisa diakses melalui: <http://events.opengovindonesia.org/materials>

- b. Pertemuan Tingkat Tinggi OGP (OGP High-Level Event) di sela-sela Sidang Umum PBB ke-69, 24 September 2014, New York⁵
 - c. OGP Roadshow Asia Pacific (Phnom Penh, Malaysia, Port Moresby, dan Yangon), Oktober 2014-Januari 2015⁶
 3. Pengarusutamaan prinsip dan nilai-nilai OGP dalam *Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs)*, sebagai salah satu forum dalam pembentukan Agenda Pembangunan Pasca 2015, sebagaimana tertuang dalam Gol No. 16: **“Achieve peaceful and inclusive societies, rule of law, effective and capable institutions”**.
 4. Pelaksanaan komitmen Indonesia di dalam menjalankan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka di dalam negeri. Elaborasi capaian akan dibahas di bagian selanjutnya laporan ini.

3. Rencana Aksi Open Government Indonesia 2014-2015

Pada tahun 2014, Indonesia menyusun 47 rencana aksi yang bersifat strategis dan ambisius, baik itu dari segi kuantitas, kualitas, maupun prosesnya.

Renaksi Open Government Indonesia 2014-2015 adalah renaksi ketiga dan memiliki rentang waktu dua tahun, satu tahun lebih panjang dari renaksi-renaksi sebelumnya. Hal ini untuk merespon perubahan kebijakan OGP skala global yang dibuat dengan tujuan agar setiap negara anggota memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan dan melaksanakan komitmen nasional yang mereka buat.

Renaksi 2014-2015 didedikasikan untuk menjawab 3 (tiga) tantangan besar, yaitu (1) mengembangkan pelayanan publik; (2) meningkatkan integritas publik; (3) mengelola sumber daya publik secara efektif. Tiga tantangan utama ini telah menjadi dasar dan prioritas dari setiap perumusan renaksi OGI yang pertama sejak tahun 2012. Pemerintah Indonesia berani berkomitmen untuk mencari solusi terhadap tiga tantangan tersebut karena sejalan dengan agenda reformasi yang telah bergulir selama satu dekade terakhir.

Dari segi kuantitas, Renaksi 2014-2015 memiliki jumlah komitmen dan kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat terbanyak sejak pertama kali Indonesia menyusun renaksi OGI di tahun 2012. Adanya peningkatan jumlah renaksi dan K/L dimaksudkan untuk menyebarluaskan semangat dan praktek keterbukaan di lebih banyak kementerian/lembaga.

Dari segi kualitas dan proses, Renaksi 2014-2015 menitikberatkan kepada pelibatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sektor pembangunan yang perlu diperbaiki.

⁵ Tautan informasi lengkap tentang kegiatan ini bisa diakses melalui:

<http://www.opengovpartnership.org/node/5626>; <http://www.opengovpartnership.org/blog/open-government-partnership/2014/09/24/outcome-statement-ogp-high-level-event-citizen-action>

⁶ Tautan informasi lengkap tentang kegiatan ini bisa diakses melalui:

<http://www.opengovpartnership.org/blog/nanda-sihombing/2014/10/27/ogp-asia-pacific-outreach-5-countries>; <http://opengovindonesia.org/pemerintah-dan-masyarakat-bahas-ogp-di-papua-nugini/>

Proses penyusunan Laporan Pelaksanaan OGI atau *Government Self-Assessment Report* ini dan upaya pencapaian komitmen kementerian/lembaga semester terakhir tahun 2014 dilaksanakan dalam periode proses perpindahan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo di bulan September/Oktober 2014. Di samping itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa beberapa perubahan di dalam struktur kabinet pemerintahan Indonesia, yang antara lain meleburkan fungsi dan struktur UKP4, sebagai *responsible agency* OGP di Indonesia ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, peleburan beberapa kementerian, seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penambahan kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Perpindahan kepemimpinan di dalam suatu pemerintahan adalah suatu hal yang lazim dan selalu terjadi. Ditengarai bahwa masa transisi politik dapat berpotensi membawa pengaruh terhadap proses pemantauan yang dilaksanakan oleh UKP4, implementasi yang dilaksanakan oleh K/L terkait, maupun tata kelola (*governance*) dari implementasi OGI itu sendiri. Perlu dilakukan sebuah kajian untuk mengidentifikasi adanya pengaruh tersebut.

4. Proses penyusunan Rencana Aksi 2014-2015: Lebih Transparan dan Lebih Partisipatif

Renaksi tahun 2014-2015 disusun melalui proses yang partisipatif, sebagaimana yang telah dilakukan pada penyusunan Renaksi tahun 2012 dan 2013. Yang berbeda dengan renaksi tahun-tahun sebelumnya, penyusunan Renaksi tahun 2014-2015 lebih transparan, dan dengan daya jangkau partisipasi yang lebih luas.

Di setiap proses perumusan Renaksi, pemerintah Indonesia kerap kali memperkenalkan terobosan-terobosan yang kiranya dapat meningkatkan efektivitas gerakan open government. Adapun terobosan signifikan yang diperkenalkan selama perumusan Renaksi 2014-15 adalah:

a. Transparansi di setiap proses perumusan renaksi

Hasil dari setiap tahapan proses penyusunan Renaksi OGI 2014-2015 dipublikasikan secara reguler. Publik secara luas dapat memperoleh akses, tidak hanya untuk dokumen rancangan awal dan akhir, tetapi juga dapat mengakses seluruh dokumen hasil rapat perumusan renaksi dimaksud. Publik dapat mengikuti dinamika proses perumusan rencana aksi dan tentu sekaligus mengawasi secara langsung masukan dan perubahan yang terjadi.

Keterlibatan publik mengikuti dan melakukan pengawasan dalam setiap tahap penyusunan rencana aksi OGI merupakan inisiatif baru dalam penyusunan kebijakan publik yang telah ada di Indonesia. Dengan kata lain, tuntutan publik agar dapat mengakses seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam penyusunan OGI 2014-2015.

Inisiatif ini akan menjadi preseden dalam mendorong percepatan pemerintahan yang terbuka, yang menjunjung transparansi secara nyata dan partisipasi secara aktif.

b. Peningkatan partisipasi aktif dari publik dalam proses perumusan

Mengambil masukan dari IRM Progress Report 2012 yang menyarankan agar proses perumusan kebijakan di dalam OGP harus dibuat lebih inklusif, dalam perumusan Renaksi OGI 2014-2015, untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan secara langsung melalui Kompetisi Ide SOLUSIMU. Kompetisi ini ditujukan untuk menjangkau berbagai ide inovatif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di bidang anti korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.

Kontes yang bertemakan “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!” telah berhasil mencapai tujuannya untuk mendorong publik berpartisipasi dan lebih aktif menyumbangkan solusi bagi pemerintahan yang lebih baik, terbukti oleh masuknya lebih dari 3,000 karya dari seluruh Indonesia baik dari masyarakat sipil maupun pegawai negeri sipil. Proses seleksi hasil karya oleh dewan juri dan hasil Top-50 dapat diakses oleh publik melalui website (www.Solusimu.org). Di dalam SOLUSIMU, ide-ide terbaik dimasukkan ke dalam Rancangan Renaksi OGI 2014-2015.

c. Adanya inisiatif dari kelompok organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia dalam mengkonsolidasikan masukan terpadu untuk renaksi OGI

OMS melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk membahas, mendiskusikan dan menghasilkan rekomendasi OMS secara terintegrasi untuk bahan masukan renaksi OGI. Kegiatan konsolidasi ini memiliki tiga makna, yaitu memastikan terjadinya partisipasi publik secara luas, terbangunnya jaringan di kalangan OMS secara meluas, dan membangun kekuatan OMS dalam membantu pemerintah melalui rekomendasi-rekomendasinya yang dapat dihargai oleh pemerintah.

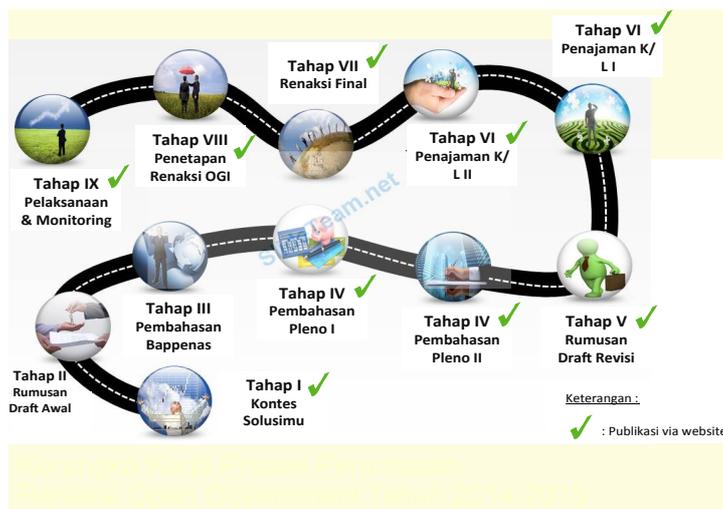
Lebih lanjut, ada 5 (lima) hal yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan Renaksi 2014-2015, yaitu:

- a. Pengarusutamaan aspek “partisipasi publik” yang menjadi tema dari Keketuaan Indonesia di OGP ke dalam berbagai kriteria keberhasilan di dalam rencana aksi. Hal ini dilakukan agar praktek dan prinsip pelibatan publik bisa terus tersosialisasikan kepada instansi pemerintah dan badan publik.
- b. Meneruskan atau melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang telah memiliki payung hukum seperti antara lain keterbukaan informasi publik, agenda pelayanan publik, dan reformasi birokrasi ke dalam renaksi OGI. Renaksi yang memiliki payung hukum biasanya membantu menjamin keberadaan renaksi tersebut di dalam rencana kerja masing-masing kementerian/lembaga, dan konsekuensinya pada ketersediaan anggarannya. Hal tersebut tentu akan membantu mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- c. Memperluas cakupan implementasi dan sosialisasi inisiatif open government sampai ke level pemerintah daerah. Tujuannya untuk menularkan, menumbuhkan semangat, menggalang inisiatif yang telah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah, serta melakukan konsolidasi, yang seluruhnya didedikasikan bagi pencapaian pemerintahan yang terbuka.
- d. Menkonsolidasikan masukan yang dihasilkan laporan IRM 2012, antara lain 1) melanjutkan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 untuk menyediakan infrastruktur yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi; dan 2) membuat proses konsultasi open government dalam negeri menjadi lebih partisipatif.
- e. Melakukan proses *quality control* terhadap implementasi rencana aksi. Setiap kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab renaksi OGI diwajibkan untuk mengumpulkan laporan perkembangannya setiap enam bulan, untuk kemudian diverifikasi keabsahannya.

Adapun dalam pembahasan rancangan renaksi, terdapat sembilan tahapan kerja yang mengikuti alur sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renaksi 2014-2015



Proses panjang ini dilalui bukan tanpa hambatan berarti. Tantangan utama yang kami hadapi selama proses perumusan renaksi ini antara lain mencakup:

- Belum tersedia payung hukum yang dapat mengikat setiap K/L yang terlibat untuk selalu disiplin dengan komitmen yang telah dibuat.
- Proses penyusunan renaksi tidak bersamaan waktunya dengan siklus proses perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga beberapa renaksi yang sedang disusun belum didukung oleh anggaran yang cukup memadai.
- Sarana sosialisasi dan promosi masih kurang optimal.
- Beberapa fokus kegiatan yang menitikberatkan pada transparansi masih menjadi isu cukup sensitif di beberapa instansi pemerintah.
- Orientasi gerakan open government masih terbatas di pemerintah pusat.

- *Sharing ownership* di antara para pemangku kepentingan masih kurang berjalan optimal.
- Mesin penggerak OGI terbatas, antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya.
- Manajemen waktu yang kurang memperhatikan aspek pelibatan publik dalam setiap tahapan penyusunan renaksi.

5. Struktur Rencana Aksi 2014-2015

Untuk tahun 2014, terdapat 47 rencana aksi OGI yang telah diurai ke dalam 64 komitmen dan telah dilaksanakan oleh 24 institusi pemerintah. Renaksi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok komitmen, yaitu:

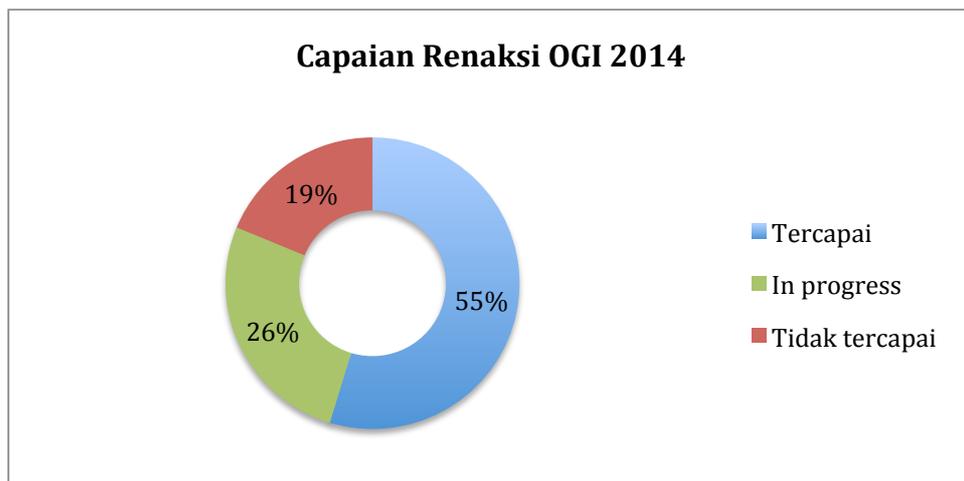
Kelompok	1	2	3	4
Tipe Komitmen	Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik	Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat	Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi	Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area yang menjadi perhatian utama publik
Area pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan KID • Revisi UU KIP • Penguatan SOP dan SP layanan publik • Media pengaduan masyarakat • Portal Open Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air bersih • Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) • Sistem layanan darurat • Transparansi di lingkungan perguruan tinggi negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrated Road Safety Management System (IRSMS)/ sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online • Layanan SIM, STNK, BPKB online • Online black list system (pengadaan barang dan jasa) • Kualitas layanan perizinan • Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) • Layanan pertanahan • Pengelolaan TKI • Pengelolaan haji • Layanan KUA • Extractive Industry Transparency Initiative • Transparansi pengelolaan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas informasi terkait lingkungan • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam perumusan AMDAL • Pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah sosial • Meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam mengembangkan sektor pertanian • Peningkatan akses terhadap informasi di sektor pariwisata

Detil dari setiap komitmen di area pengembangan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas tertuang dalam Format Delapan Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (**LAMPIRAN I**). Harapan kami, lampiran ini bisa membantu publik untuk

lebih memahami kriteria dan ukuran keberhasilan masing-masing komitmen dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab.

6. Pencapaian Rencana Aksi

Secara garis besar, hasil capaian 24 kementerian/lembaga terhadap 64 komitmen yang tertuang di dalam Renaksi OGI 2014 adalah sebagai berikut:



Dari 64 komitmen, sebanyak 35 komitmen berhasil mencapai target capaian, 17 komitmen sudah mulai dijalankan namun belum mencapai target capaian, 12 komitmen belum dijalankan sama sekali ataupun tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari penanggung jawab terkait.

Secara ringkas, tingkat ketercapaian Renaksi OGI 2014 terangkum di dalam tabel di bawah ini.

Tingkat keberhasilan/ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area pengembangan	Faktor pendukung
Tercapai	55% (35)	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur keterbukaan informasi pusat dan daerah • Sistem pengaduan masyarakat di level nasional dan sub-nasional • Publikasi data penyediaan air minum dan air bersih • Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online • Terimplementasinya pilot project sistem online utk pelayanan SIM, STNK, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancarnya proses komunikasi dua arah antara UKP4 dengan unit atau K/L penanggung jawab terkait membantu kedua belah pihak dalam mencapai target atau indikator keberhasilan yang telah disepakati bersama • Adanya komitmen yang kuat dari unit

Tingkat keberhasilan/ ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area pengembangan	Faktor pendukung
		BPKB <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya regulasi terkait sistem black list dalam pelaksanaan barang dan jasa • Pembentukan Investor Relations Unit (IRU) di 33 provinsi • Terbangunnya Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang valid dan berkelanjutan • Pengembangan sistem pelayanan informasi pertanahan secara online • Terpublikasikannya secara online informasi dasar terkait dengan pengelolaan TKI • Terpublikasikannya secara online informasi dasar terkait pelayanan haji dan KUA • Terpublikasikannya laporan EITI (2010/11) • Terpublikasikannya secara online data produksi dan penerimaan untuk migas dan minerba setiap triwulan • Peningkatan keterlibatan masyarakat di dalam menghadapi isu-isu sosial seperti lingkungan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat kecil dan minoritas. 	atau K/L penanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> • Adanya landasan hukum terkait dengan komitmen yang terlaksana • Renaksi/ komitmen yang disepakati tertuang di dalam rencana kerja, program, dan anggaran K/L terkait • Adanya <i>reformers</i> dalam K/L terkait yang menjadi agen-agen keterbukaan
Dalam proses pencapaian	26% (17)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur mekanisme penyelenggaraan layanan publik • Pengembangan media pengaduan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan masyarakat yang cukup intensif untuk beberapa kasus tertentu memakan waktu/ persiapan yang lebih lama untuk

Tingkat keberhasilan/ ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area pengembangan	Faktor pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Portal Open Data • Pengembangan infrastruktur layanan kesehatan darurat yang terintegrasi • Transparansi pengelolaan SDA • Peningkatan partisipasi publik dalam proses perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah 	<p>mematangkan pelaksanaan sebuah renaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • K/L tertentu belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap penyelenggaraan layanan publik • Dikeluarkannya kebijakan baru di tengah tahun berjalan yang tidak memberikan kewenangan kepada K/L untuk melaksanakan renaksi/komitmen yang sudah disepakati • Tingkat komitmen K/L yang berbeda • Pemotongan anggaran di tengah tahun berjalan
Tidak tercapai	19% (12)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi di lingkungan perguruan tinggi • Peningkatan kualitas pelayanan PTSP • Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan • Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga parlemen 	<ul style="list-style-type: none"> • K/L tertentu belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap penyelenggaraan layanan publik • Kurang efektifnya komunikasi selama proses perumusan dan penetapan renaksi • Tidak tertuangnya renaksi di dalam rencana kerja dan anggaran K/L • Renaksi tidak dijalankan karena tidak sesuai dengan

Tingkat keberhasilan/ ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area pengembangan	Faktor pendukung
			kewenangan atau tupoksi K/L <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemotongan anggaran di tengah tahun berjalan • Rendahnya level komitmen untuk berkolaborasi maupun menjadi agen keterbukaan di masing-masing unit kerja • Tidak tersedianya informasi yang jelas terhadap pelaksanaan renaksi yang menyulitkan dilakukannya proses monitoring dan evaluasi • Renaksi dibatalkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun renaksi tersebut masih tertuang di dalam dokumen yang terpublikasikan ke masyarakat
Total	100% (64)		

Agar dapat mengevaluasi secara detil pencapaian setiap komitmen, kami harapkan publik bisa merujuk kepada **Lampiran II** (Tabel Capaian Renaksi OGI 2014).

Sebagai perbandingan, di bawah ini adalah tabel tingkat ketercapaian Renaksi OGI dari tahun 2012.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Ketercapaian Renaksi OGI

	2012	2013	2014
Jumlah KL	14	13	24
Renaksi	38	21	64
Capaian (dalam %)	76.6%	85.7%	55%

7. Komitmen Unggulan OGI 2014

Tim OGI memiliki dua komitmen unggulan yang dilakukan di tahun 2014 dan akan terus dilanjutkan di tahun 2015. Dua komitmen ini merupakan refleksi keseriusan pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan.

a. Inisiatif Open Data Indonesia

Inisiatif Open Data Indonesia (www.data.go.id) secara resmi diluncurkan pada September 2014 sebagai bentuk pengejawantahan lebih lanjut dari UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bagian dari solusi OGI.

Langkah inovatif Indonesia mendapatkan apresiasi dari benchmark internasional Open Data Barometer (ODB) 2015. Saat ini telah ada 1000 data set dari 26 K/L/D dan 1 instansi lain-lain non K/L/D yang telah terhubung dengan Portal Data Indonesia. Di samping itu, publik telah memanfaatkan berbagai data set dalam Portal Data Indonesia menjadi berbagai aplikasi dan visualisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan kesemuanya dapat diunduh melalui website Portal Data Indonesia.

Gerakan Open Data Indonesia sudah diimplementasikan di sedikitnya 3 Pemerintah Daerah: DKI Jakarta, Bandung, dan Bojonegoro. Saat ini dari 27 K/L/D maupun non K/L/D yang sudah terhubung, kesiapan K/L/D untuk bisa mempublikasikan data secara mandiri masih beragam.

Perkembangan gerakan open data di Indonesia telah diapresiasi oleh Open Data Barometer (ODB) karena dinilai telah menunjukkan perubahan terbesar (+16), paling progresif, dari tahun 2013-2014 dibandingkan dengan 86 negara peserta survey ODB lainnya.⁷

Selain itu, di tingkat nasional, beberapa K/L yang melaksanakan rencana aksi OGI 2014 mengalami kemajuan di dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses informasi bagi publik. K/L tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik. K/L yang dimaksud antara lain: Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini nomenklatur nya berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Agama, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (untuk EITI), dan Kementerian Pariwisata (untuk <http://indonesia.travel/>).

⁷ Open Data Barometer adalah sebuah index yang dikelola oleh World Wide Web Foundation untuk mempelajari dampak dan kegunaan inisiatif open data di seluruh dunia. Open Data Barometer pertama kali dimunculkan di tahun 2013, dan sekarang sudah memasuki edisi kedua (diluncurkan pada Januari 2015).

b. Saluran aspirasi dan pengaduan publik

Syarat pemerintahan yang responsif dan terbuka adalah pemerintahan yang memiliki mekanisme dan tata kelola yang efektif di dalam menerima masukan maupun kritik terhadap proses pembangunan dan aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sejak tahun 2011, pemerintah Indonesia mencetuskan program LAPOR! (www.lapor.ukp.go.id/) yang harapannya bisa terus menjadi cikal bakal dari sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terhubung dan dimanfaatkan di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Landasan hukum pembentukan LAPOR! adalah UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No. 76/ 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PANRB) No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, dan Permen-PANRB No. 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (SP4N).

LAPOR! Saat ini telah terhubung dengan 33 Kementerian, 4 Lembaga Negara, dan 46 BUMN. Sedangkan untuk level Pemerintah Daerah, saat ini sudah terhubung ke 5 pemerintah daerah. Untuk mendorong pemanfaatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan dalam tingkat nasional, di tahun 2014 UKP4 bekerja sama dengan KemPANRB telah menfinalisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - SP4N - (*National Complaint Handling System*). SP4N mewajibkan seluruh instansi pemerintah (termasuk pemda) wajib terhubung ke LAPOR! dalam waktu 5 tahun ke depan.

8. Penutup

Inisiatif Open Government Indonesia terus bergulir dan menghasilkan momentum positif walaupun harus melewati fase kritikal dalam sebuah pemerintahan, seperti masa kampanye pemilu, transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) ke Presiden Joko Widodo, dan restrukturisasi struktur kabinet pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo.

Beberapa *lessons learned* yang perlu mendapatkan perhatian bagi penyusunan renaksi selanjutnya, antara lain adalah:

- a. Jumlah komitmen dan K/L yang jumlahnya hampir dua kali lipat pada Renaksi 2014 dibandingkan dengan renaksi tahun-tahun sebelumnya membawa tingkat kerumitan dan tantangan tersendiri di dalam proses monitoring dan evaluasi dalam pencapaian komitmen. Namun, sumber daya manusia dan waktu yang tersedia untuk melakukan pemantauan sama besarnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kiranya ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pemantauan yang ada saat ini agar ke depan dapat berjalan lebih efektif.

- b. Salah satu kunci keberhasilan pencapaian renaksi adalah komunikasi yang efektif antar stakeholder kunci.
- c. Perumusan renaksi perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan aspek regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.
- d. Perumusan renaksi di dalam tahun transisi juga perlu dipertimbangkan secara matang, bagaimana cara mengantisipasi resiko yang dihadapi agar proses implementasi maupun *handover* (jika relevan) dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- e. Walaupun secara keseluruhan proses perumusan Renaksi 2014-2015 sudah jauh lebih transparan, diakui bahwa konsistensi dalam menjaga transparansi proses di setiap tahapan bukanlah hal yang mudah dalam implementasinya dan perlu terus disempurnakan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan publik perlu terus mempererat hubungan kerja maupun komunikasi dua arah yang harmonis agar sistem *checks and balances* bisa terus berjalan.

Langkah Selanjutnya

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui visi misi Nawacitanya berkomitmen untuk meneruskan agenda-agenda reformasi yang sudah bergulir sejak tahun 1998. Untuk terus meningkatkan performa pemerintah Indonesia di dalam menjalankan komitmen open government di tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang, laporan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis ke depan untuk dijadikan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Open Government Indonesia:

- a. Perlu segera ditunjuk *responsible agency* baru beserta Menteri penanggung jawab untuk meneruskan peran UKP4 yang sudah berakhir per 30 Desember 2014. K/L yang akan menggantikan peran UKP4 memiliki peran vital di dalam mengaktifkan kembali infrastruktur kelembagaan (tim koordinator pelaksanaan OGP di Indonesia/ Sekretariat Open Government Indonesia) beserta seluruh aktivitas yang sempat tertunda sejak berakhirnya masa tugas staf dan pimpinan UKP4, termasuk di dalamnya agenda monitoring dan evaluasi capaian Renaksi OGI 2015.
- b. Gerakan open government perlu dipertahankan untuk memantapkan pelaksanaannya secara berkelanjutan, dan bahkan perlu diperluas (baik secara horizontal/ sektoral maupun vertikal/menjangkau sub-nasional) untuk menjamin keberlanjutannya. Salah satu solusinya adalah dengan merumuskan payung hukum untuk menjamin keberlanjutan implementasi OGI.

- c. Strategi kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan organisasi masyarakat sipil menjadi suatu keniscayaan untuk mendukung efektifitas gerakan open government yang memiliki daya jangkau lebih luas.
- d. Untuk memastikan dan memantapkan agenda open government, Pemerintah Indonesia telah memasukan pengarusutamaan *good governance* termasuk di dalamnya open government ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pelembagaan praktik dan prinsip open government ke dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Tantangan ke depan adalah memastikan pengarusutamaan ini dapat terlaksana, sehingga dapat dituangkan ke dalam renaksi tahun selanjutnya.
- e. Perumusan renaksi perlu mengacu kepada prioritas pembangunan 5 tahun ke depan, dan agar target pembangunan yang akan dicapai menjadi lebih fokus, perlu disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran program pembangunan agar dapat dijamin pelaksanaannya secara efektif.
- f. Masyarakat nasional maupun internasional mulai mempertanyakan dampak yang dibawa oleh inisiatif open government di dalam kehidupan mereka. Sejak inisiatif OGI digulirkan di Indonesia di tahun 2011, memang studi mengenai dampak inisiatif OGI belum pernah dilakukan. Untuk meningkatkan efektivitas dan *buy-in* dari seluruh pemangku kepentingan, studi mengenai dampak inisiatif OGI terhadap keberlangsungan hidup masyarakat perlu dilakukan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat di dalam perencanaan maupun pemanfaatan inisiatif OGI sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
